

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2021

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK





KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020.

Penyusunan laporan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun sebagai media pertanggungjawaban yang memuat informasi tentang pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, karena itu masukan dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan. Kiranya laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pontianak, Maret 2021

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PONTIANAK**


drg. MULTI J. BHATARENDRO, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP 19640114 198812 1 002



DAFTAR ISI

KATA		PENGANTAR	i
.....			
DAFTAR		ISI	ii
.....			
BAB I	: PENDAHULUAN		1
.....			
BAB II	: PERENCANAAN	KINERJA	11
.....			
BAB III	: AKUNTABILITAS	KINERJA	25
.....			
	A. Capaian	Kinerja Organisasi	25
.....			
	B. Realisasi	Anggaran	64
.....			
BAB IV	: PENUTUP		66
.....			
LAMPIRAN	: 1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021		
	2. Rencana Aksi 2021		
	3. Renstra 2020 - 2024		

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), memiliki nomenklatur Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana (BP2KB), munculnya Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak menyebabkan perubahan nomenklatur nama BP2KB menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB), dengan masuknya Urusan Pemberdayaan Masyarakat pada waktu itu BPMPAKB memiliki tiga urusan wajib yaitu Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Keluarga Berencana.

Pada tahun 2017, sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah nomenklatur BPMPAKB berubah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), dengan kriteria tipologi A dan menjalankan urusan wajib bukan pelayanan dasar pemerintah yaitu bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak sesuai Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris.
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan

3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk.
 1. Kepala Seksi Perencanaan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
 2. Kepala Seksi Penyuluhan dan Penggerakan.
- d. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
 1. Kepala Seksi Keluarga Berencana; dan
 2. Kepala Seksi Keluarga Sejahtera.
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan ; dan
 2. Kepala Seksi Perlindungan Anak.
 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Berikut tugas pokok dari masing-masing jabatan yang ada di DP2KBP3A Kota Pontianak :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

c. Kasubbag Umum dan Aparatur

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian.

d. Kasubbag Perencanaan

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan.

e. Kasubbag Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Keuangan.

f. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang Pengendalian Penduduk.

g. Kepala Seksi Perencanaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

Kepala Seksi Perencanaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang Perencanaan Perkiraan dan Pengendalian Penduduk.

h. Kepala Seksi Penyuluhan dan Penggerakan

Kepala Seksi Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Penyuluhan dan Penggerakan.

i. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kepala Bidang **Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera** mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

j. Kepala Seksi Keluarga Berencana

Kepala Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Keluarga Berencana.

k. Kepala Seksi Keluarga Sejahtera

Kepala Seksi Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Keluarga Sejahtera.

l. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

m. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan

Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Pemberdayaan Perempuan.

n. Kepala Seksi Perlindungan Anak

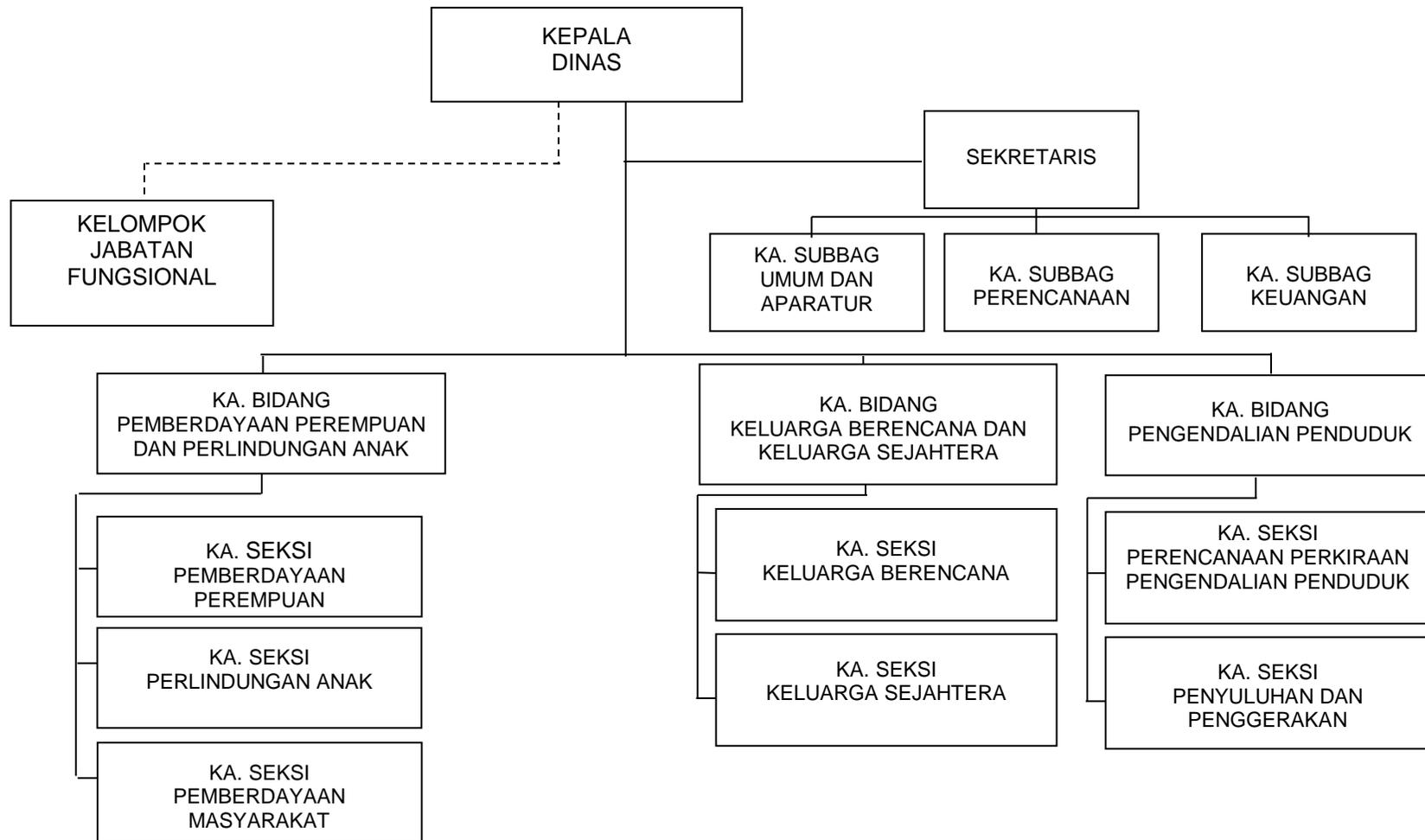
Kepala Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Perlindungan Anak.

o. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam, mempunyai tugas pokok mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

**Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak**



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak memerlukan berbagai sumber daya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sampai akhir tahun 2021, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi didukung oleh 28 orang pegawai.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak terdiri dari: Gedung kantor, rumah shelter, kendaraan roda empat sebanyak 4 unit, kendaraan roda dua sebanyak 54 unit dan sarana pendukung lainnya seperti yang terdapat dalam kartu inventaris barang.

3. Sumber Dana

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bersumber dari APBD Kota Pontianak. Penganggaran dana untuk kegiatan baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak telah mengacu kepada Kepmendagri Nomor 13 tahun 2006 yaitu melalui Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). Rencana Strategis dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.

Sumber dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas Organisasi tahun 2021 bersumber dari APBD Kota Pontianak berupa Dokumen Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak

Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 9.462.028.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

**Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	0	0	0,00	0
5	BELANJA DAERAH	12.012.052.923	10.826.008.021	(1.186.044.902,00)	(9,87)
5.1	BELANJA OPERASI	10.811.813.823	9.476.230.683	(1.335.583.140,00)	(12,35)
5.1.01	Belanja Pegawai	5.505.694.842	4.761.637.098	(744.057.744,00)	(13,51)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.306.118.981	4.714.593.585	(591.525.396,00)	(11,15)
5.2	BELANJA MODAL	1.200.239.100	1.349.777.338	149.538.238,00	12,46
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	643.216.100	792.754.338	149.538.238,00	23,25
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	557.023.000	557.023.000	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	12.012.052.923	10.826.008.021	(1.186.044.902,00)	(9,87)
	Surplus/Defisit	(12.012.052.923,00)	(10.826.008.021,00)	(1.186.044.902,00)	10,96

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berhadapan dengan permasalahan utama yang berasal dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

- a) Sarana dan prasarana belum memadai.
- b) Pengelolaan dan pengembangan data belum optimal.
- c) Masih kurangnya tenaga teknis yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing - masing.
- d) Jumlah personel yang belum memadai di bidang Pengendalian Penduduk dimana hanya tersedia 2 orang staf untuk membantu 2 kepala seksi.

b. Lingkungan Eksternal

- a) Masih adanya kematian Ibu Hamil muda.
- b) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
- c) Penjualan Anak (Trafficking)
- d) Rendahnya kesadaran masyarakat Kurang Mampu dalam melakukan Program KB.

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pemerintahan di daerah disertai dengan penyerahan keuangan untuk dapat melaksanakan kewenangannya. Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan dalam penggunaan anggaran tersebut perlu disusun Laporan Kinerja seperti diatur dalam Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder*, sekaligus sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja agar terdapat upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah yang bersangkutan untuk memperbaiki kinerjanya di masa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN : 1. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

2. RENCANA AKSI

3. RENSTRA 2020 - 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020 berkaitan erat dengan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak yang tertuang dalam Rencana Strategis DP2KBP3A Kota Pontianak tahun 2020-2024 sebagai berikut:

2.1.1 Visi dan Misi Walikota Pontianak

**PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA, BERWAWASAN
LINGKUNGAN YANG CERDAS DAN BERMARTABAT**

Untuk mewujudkan Visi Walikota tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke 1 yaitu **“Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya”** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah **“Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak”**.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran DP2KBP3A Kota Pontianak

Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak adalah sejalan dengan

tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Adapun focus utama dari sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya baik manusia, prasarana dan sarana yang ada dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun harus dapat dicapai serta berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak menetapkan sasaran serta indikator yang menjadi tolak ukur sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	: “ Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak”
OPD PENGAMPU	: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,65%
2	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,92%
3	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Pratama

2.2 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama(IKU). Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Nomor 16 tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Indikator Kinerja Utama (IKU) DP2KBP3A
Kota Pontianak 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,65%
2	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,92%
3	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Pratama

2.3 Perjanjian Kinerja

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2021 telah menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Walikota Pontianak. Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pada bulan Oktober 2021 sebagaimana terlampir pada laporan ini.

Penetapan Kinerja, yang kemudian disebut sebagai Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014, merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut PermenPAN No. 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini, terwujudlah komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

**Perjanjian Kinerja DP2KBP3A
Kota Pontianak 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,65%
2	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,92%
3	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Pratama

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mewujudkan sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam IKU dan Perjanjian Kinerja 2021 adalah sebagai berikut :

1. SASARAN 1 : “Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,65%

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk sasaran 1 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator Kinerja **Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak** pada tahun 2021 menargetkan 1,65% pertumbuhan penduduk Kota Pontianak, hal ini sesuai dengan Perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2021 antara Kepala Dinas dan Walikota Pontianak. Untuk mencapai target indikator tersebut dilaksanakan 3 (tiga) Program, 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan

a. Indikator “Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak”.

Strategi pencapaian Indikator ini melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program, 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pengendalian Penduduk;

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target
1.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk	a) TFR (Angka Kelahiran Total)	2,39%
			b) Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	549

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan target output kegiatan yaitu :

(1) Persentase keterlibatan stackholder dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk

i. Sub Kegiatan Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga dengan target output sub kegiatan yaitu :

- Jumlah data keluarga yang dimutakhirkan sebanyak 1 data

ii. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga dengan target output sub kegiatan yaitu :

- Jumlah data dan informasi keluarga yang dikelola sebanyak 1 data

iii. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB dengan target output sub kegiatan yaitu :

- Jumlah data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang dikelola sebanyak 30 data

2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	a) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,48 %
			b) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12,47 %

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan output kegiatan yaitu:
- (1) Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) sebesar 75%
 - i. Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja dengan target output sub kegiatan yaitu :
 - Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif sebanyak 1 Pokja
 - ii. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan target output sub kegiatan yaitu :
 - Jumlah Pelaksanaan Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan sebanyak 48 kegiatan
 - iii. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dengan target output sub kegiatan yaitu :
 - Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan dana operasional dan sarana sebanyak 5 Balai KB
- b) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu :
- (1) Persentase klinik KB swasta dan Pemerintah yang mendapatkan bantuan Obat-Obatan Habis Pakai Penunjang Pelayanan KB sebesar 100%
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB dengan target output sub kegiatan yaitu :
 - Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB sebanyak 5 paket

ii. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan target output sub kegiatan yaitu :

- Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebanyak 50 peserta

3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target
1.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Mewujudkan Keluarga yang Mandiri, Tentram dan bahagia (keluarga berkualitas)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	19%

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan output kegiatan yaitu:

(1) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 60,12 %

i. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan target output sub kegiatan yaitu :

- Jumlah Penyediaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebanyak 2 paket

ii. Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan target output sub kegiatan yaitu :

- Jumlah peserta aktif yang mendapatkan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebanyak 50 Peserta
- iii. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan target output sub kegiatan yaitu :
 - Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebanyak 3 kegiatan
- iv. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) dengan target output sub kegiatan yaitu :
 - Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga sebanyak 3 kegiatan

2. SASARAN 2 : “Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
2	Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,92 %

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk sasaran **2** Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan indikator Kinerja **Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak** pada tahun 2021 menargetkan 93,92%, target tersebut sesuai dengan Perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2021 antara Kepala Dinas dan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak

Walikota Pontianak. Untuk mencapai target indikator tersebut dilaksanakan 2 (dua) Program 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan.

Indikator “Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak”.

Strategi pencapaian Indikator ini melalui pelaksanaan 2 (dua) Program dan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target
1.	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Pengarus Utamaan Gender serta Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	a) Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Pratama

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu :

(1) Persentase ARG pada belanja langsung APBD sebesar 11,12%

i. Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan target output yaitu :

- Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG sebanyak 20 lembaga

ii. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan target output yaitu :

- jumlah peserta aktif dalam sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi sebanyak 800 peserta

2) Program Perlindungan Perempuan

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Target
1.	Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		0,0038

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut :

b) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu :

(2) Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani sebesar 100%

i. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan target output yaitu :

- Jumlah rakor dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan sebanyak 3 kegiatan.

ii. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output yaitu :

- Jangka waktu penyediaan rumah aman /shelter untuk perempuan dan anak korban kekerasan sepanjang 12 bulan

3. SASARAN 3 : “Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
3	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Pratama

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk sasaran **3** Meningkatkan perlindungan terhadap anak dengan 1 Indikator Kinerja. Hal ini sesuai dengan Perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2021 antara Kepala Dinas dan Walikota Pontianak. Untuk mencapai target indikator tersebut dilaksanakan 2 (dua) Program 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan

1) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target
1.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a) Persentase Forum Anak Daerah Aktif	100%

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu :

(1) Persentase pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha sebesar 30%

i. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output yaitu :

- Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan Advokasi

Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak
sebanyak 20 Lembaga

2) Program Perlindungan Khusus Anak

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target
1.	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	a) Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota	100%

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dengan target output kegiatan yaitu :

(1) Persentase korban kekerasan anak yang terlayani sebesar 100%

i. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target output yaitu :

- Jumlah kasus anak mendapat mendampingan sebesar 76 kasus

ii. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output yaitu :

- Jumlah kasus anak dan perempuan yang ditangani sebesar 150 kasus

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2021, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan / kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan Dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja tersebut, dokumen dan data kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja adalah :

1. Dokumen review Ke-2 Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2020 (**Lampiran**);
2. Dokumen rencana kegiatan atau Rencana Aksi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 (**Lampiran**);
3. Dokumen penetapan kinerja (TAPKIN), sebagaimana termuat pada Penetapan Kinerja Tahun 2021 (**Lampiran**);
4. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) beserta laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penggunaan anggaran Tahun 2021.

Dalam laporan akuntabilitas ini, pengukuran capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak mencakup 7(tujuh) unsur utama, yaitu :

1. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan antara Target outcome yang ditetapkan dari masing-masing Indikator kinerja sasaran dengan Realisasi dari sasaran yang dicapai.
2. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan antara Realisasi kinerja sasaran serta Capaian kinerja sasaran Tahun 2021 dengan beberapa tahun terakhir.
3. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan Realisasi kinerja sasaran dan Target Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Restra/ RPJMD.
4. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan Realisasi kinerja sasaran Tahun 2021 dengan Standar Nasional

5. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
6. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya.
7. Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (output), dengan cara menganalisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja.

Analisis terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

1. Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing - masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
> 85	= Sangat Berhasil
70 < X ≤ 85	= Berhasil
55 < X ≤ 70	= Cukup Berhasil
≤ 55	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing - masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "**Metode Rata - Rata Data Kelompok**". Penyimpulan capaian sasaran dengan "**Metode Rata- Rata Data Kelompok**" adalah penyimpulan pada tingkat sasaran yang dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai maen (rata - rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator untuk Setiap Kategori} \times \text{Nilai Mean Setiap Kegiatan}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}}$$

Nilai mean setiap kategori adalah sebagai berikut :

Nilai Mean (x)	Kategori
92,5	= Sangat Berhasil
77,5	= Berhasil
62,5	= Cukup Berhasil
27,5	= Tidak Berhasil

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil** dan **tidak berhasil**.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil Instansi Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan diatas, tingkat Pencapaian indikator sasaran DP2KBP3A Kota Pontianak Tahun 2021 dapat dilihat pada matrik sebagai berikut :

Tabel. III.1
Capaian Indikator Sasaran Strategis DP2KBP3A Kota Pontianak
Tahun 2021

No	Indikator Sasaran Strategis	Nilai Capaian	Skala Pengukuran Ordinal			
			$X > 85$	$70 < X \leq 85$	$55 < X \leq 70$	$X \leq 55$
1.	Sasaran Strategis :	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.1	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	91,16%				
1.2	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	100,10%				
1.3	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Pratama				
Jumlah Keseluruhan Capaian		100%				

Dari tabel diatas dapat terlihat dari 3 indikator sasaran, 3 indikator sasaran dikategorikan sangat baik.

Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- SASARAN STRATEGIS : “ Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak”
- OPD PENGAMPU : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,65%	1,81%
2	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,92%	94,01%
3	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Pratama	Pratama

Adapun Pengukuran Indikator Kinerja Utama pada sasaran DP2KBP3A Kota Pontianak, dapat dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi

Tabel. III.2

Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,65%	1,81%	91,16%
Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak		93,92%	94,01%	100,10%	
Tingkat Capaian Kota Layak Anak		Pratama	Pratama	Pratama	

Sumber : BPS dan DP2KBP3A Kota Pontianak, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 3 indikator kinerja utama yaitu :

1) **“Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak”** dengan target 1,65% **tidak berhasil** dicapai dengan realisasi mendekati dengan apa yang telah ditargetkan yaitu 1,85% laju pertumbuhan kota Pontianak. Namun untuk diketahui bahwa data capaian untuk indikator tersebut adalah angka capaian pada tahun 2020, karena data merujuk pada data yang dikeluarkan oleh BPS Kota Pontianak dalam buku Kota Pontianak Dalam Angka 2022.

Capaian Indikator Kinerja Utama dikatakan **“Berhasil”** jika Realisasi lebih kecil atau sama dengan Target, dan sebaliknya Capaian Indikator Kinerja Utama dikatakan **“Tidak Berhasil”** jika Realisasi lebih besar dari Target.

Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota yaitu :

a. Program Pengendalian Penduduk;

Ada 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 1 sub kegiatan yang capaiannya dibawah 90% karena ada selisih pembayaran narasumber yang berasal dari internal OPD dan hanya dapat dibayarkan 50%

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);

Ada 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 2 sub kegiatan yang capaian realisasi dibawah 80% dikarenakan sumber dana DAK Non Fisik BOKB. pencapaian output sesuai target, realisasi belanja 53% karena ada beberapa belanja yang tidak dapat diserap antara lain; distribusi alkon biaya pembelian bahan

bakar tidak dapat diserap dikarenakan distribusi alkon menggunakan kendaraan dinas dan sewa dari pihak ke tiga, belanja jasa pelayanan KB MKJP tidak dapat diserap dikarenakan tidak memenuhi target akseptor yang telah ditetapkan BKKBN Pusat sebanyak 1114 akseptor hanya terealisasi 77 akseptor, serta sumber dana DAK Fisik sub bidang KB, target 4 paket pengadaan yaitu BKB Kit, Kit Siap Nikah, Pembangunan Balai Penyuluhan Kec Pontianak Kota, Pengadaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan pengadaan Mobil Antar Jemput calon Akseptor KB, Terealisasi sebanyak 4 paket pengadaan, pengadaan mobil tidak dapat terealisasi karena terkendala pada awal tahun harga dari LKPP untuk Mobil pemerintah belum keluar, setelahnya dilakukan lelang cepat sebanyak 2 kali gagal karena penawaran dari penyedia tidak sesuai dengan spek teknis / HPS yang telah di susun oleh PPKOM, selain itu terdapat selisih penawaran yang cukup besar (100jt) dengan pagu pada paket pekerjaan pembangunan balai penyuluhan KB

- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
Ada 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 1 sub kegiatan yang capaian realisasinya dibawah 90% dikarenakan sumber dana DAK Non Fisik BOKB, realisasi sebesar 70% dikarenakan ada selisih biaya transport antara juknis BOKB dan perwa standar biaya, serta kendala awal tahun kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan mengumpulkan banyak orang, terhambat oleh pembatasan sosial Covid
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat;
Ada 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan dan realisasi dibawah 90% dikarenakan pada tahun 2021 lomba kelurahan pada

tingkat nasional ditiadakan dan menyebabkan belanja perjalanan dinas keluar daerah tidak dapat diserap.

- 2) Indikator kinerja utama **“Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak”** dengan target 93,92% **berhasil** dicapai dengan realisasi yaitu 94,01%, melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Kinerja Utama dikatakan **“Berhasil”** jika Realisasi lebih tinggi atau sama dengan Target, dan sebaliknya Capaian Indikator Kinerja Utama dikatakan **“Tidak Berhasil”** jika Realisasi lebih kecil dari Target.

Adapun Program yang mendukung Capaian **“Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak”** yaitu :

- a. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;

Terdapat 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang dilaksanakan, seluruh sub kegiatan pencapaian target diatas 90%

- b. Program Perlindungan Perempuan;

Ada 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang dilaksanakan, seluruh sub kegiatan pencapaian target diatas 90%.

- 3) Indikator kinerja utama **“Tingkat Capaian Kota Layak Anak”** dengan target kategori Pratama **berhasil** dicapai, berdasarkan penilaian dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 Kota Pontianak dianugerahkan kategori Pratama untuk capaian Kota Layak Anak.

Capaian Indikator Kinerja Utama dikatakan **“Berhasil”** jika Realisasi lebih tinggi atau sama dengan Target, dan sebaliknya Capaian Indikator Kinerja Utama dikatakan **“Tidak Berhasil”** jika Realisasi lebih kecil dari Target.

Adapun Program yang mendukung capaian IKU diatas yaitu :

- a. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);

Ada 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan terealisasi sebesar 89%

b. Program Perlindungan Khusus Anak;

Terdapat 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, seluruh sub kegiatan realisasi dibawah 80%, dikarenakan sumber pendanaan dari DAK Non Fisik, peruntukan belanja sudah ditetapkan oleh kementerian, sehingga daerah tidak bisa melakukan pergeseran anggaran yang tidak dapat diserap, belanja yang tidak dapat diserap yaitu belanja mediko legal, pemeriksaan untuk korban hidup dan meninggal (autopsi), bidang PPPA sudah menindaklanjuti melalui PKS dengan RS bhayangkara dan kepolisian, namun pihak kepolisian juga memiliki anggaran untuk Mediko legal, belanja lainnya yang tidak dapat diserap yaitu belanja tenaga ahli untuk kasus persidangan, dan biaya penjangkauan korban diluar kota tidak dapat diserap karena bergantung pada ada tidaknya kasus tersebut.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan beberapa Tahun terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja DP2KBP3A Kota Pontianak Tahun 2021, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2019 dan di Tahun 2020. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut :

Tabel III.3
Tabel Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2021 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,65%	1,40%	1,81%	1,81%	91,16%
2.	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,92%	93,81%	93,73%	94,01%	100,10%
3.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama

Sumber : BPS dan DP2KBP3A Kota Pontianak, 2021

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, pada masing-masing Indikator sebagai berikut :

- 1) Dari tabel diatas terlihat bahwa tahun 2019 realisasi 1,40% atau capaian lebih dari 100% capaian indicator, pada tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan sebesar 0,41% atau berada di angka 1,81% menjau dari target yang ditetapkan, sedangkan untuk capaian pada tahun 2021 masih mengacu pada capaian tahun 2020, dikarenakan update data belum tersedia oleh BPS Kota Pontianak dalam Buku Pontianak Dalam Angka Tahun 2022, untuk Indikator Kinerja Utama ” Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak” secara berturut – turut mencapai lebih dari 100%. Indikator dikatakan berhasil jika realisasi capaian lebih rendah dari target.
- 2) Dari tabel diatas terlihat bahwa Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak pada tahun 2019 realisasi kinerja 93,81% sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,04% atau diangka 93,73% dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan angka Indeks Pembangunan Gender yang signifikan sebesar 0,28% atau diangka 94,01%. Hal ini berarti kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki semakin

mengecil di beberapa bidang pembangunan. Adanya fluktuasi nilai IPG ini akibat perubahan dari sisi kecepatan capaian pembangunan laki-laki, yang memiliki akselerasi lebih tinggi. Terdapat peningkatan Indeks Pembangunan Gender dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, adapun faktor pendukung meningkatnya Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak tersebut dapat didukung dari :

- ✓ Sebagian OPD yang ada di kota Pontianak telah melakukan pemilahan data Gender.
- ✓ Telah dilakukan sosialisasi terhadap OPD dan stackholder terkait berkenaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
- ✓ Sebagian OPD yang telah mendapat Sosialisasi PPRG telah menyusun Rencana Anggaran yang berbasis Gender

3) Tingkatan dalam pencapaian predikat Kota Layak Anak terdiri 5 tingkatan yaitu : Pratama ; Madya; Nindya; Utama; Kota Layak Anak.

Indikator Kinerja Tingkat Capaian Kota Layak Anak antara periode 2019, 2020 dan 2021 menyandang predikat Pratama. Tidak adanya peningkatan pencapaian kategori disebabkan banyak faktor. Oleh karena penilaian kota layak anak memiliki banyak indikator yang harus di isi dan dicapai yang melibatkan banyak stackholder baik dari Pemerintah maupun pihak Swasta. Indikator tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 12 Tahun 2011.

Sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.

Faktor yang paling besar mempengaruhi penurunan pencapaian Predikat Kota Layak Anak adalah, pemerintah kota Pontianak belum

mengadakan Konvensi Hak Anak (KHA), selain itu masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak juga menjadi faktor penting dalam terjadinya penurunan pencapaian Predikat Kota Layak Anak.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel. III.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021 dan Target Jangka Menengah Renstra

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Target Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,65%	1,81%	1,11%
2	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,92%	94,01%	94,17%
3	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Pratama	Pratama	Utama

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2021

Berikut ini Analisis Capaian Kinerja masing – masing Indikator :

- 1) Indikator Kinerja Utama Persentase Laju Pertumbuhan Kota Pontianak pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 1,65% dan terealisasi sebesar 1,81% serta untuk target jangka menengah sesuai dokumen Renstra OPD DP2KBP3A pada tahun 2020 – 2024 target akhir Renstra ditargetkan penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,11%. Dengan demikian realisasi Capaian Kinerja untuk 2020 jika diukur dengan capaian akhir Renstra telah terealisasi sebesar 61,33%. Masih ada waktu 2 tahun sebelum mencapai akhir masa Renstra, beberapa strategi yang diambil untuk mencapai target akhir Renstra antara lain; melakukan penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan kemudian Dokumen tersebut diPerdakan.

Tujuan disusunnya GDPK sendiri setidaknya mencakup delapan hal: (1) Mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, budaya berlandaskan iman dan taqwa, sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan, (2) Mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, (3) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan, (4) Mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja, (5) Mewujudkan pengarahannya mobilitas penduduk secara merata antar wilayah kecamatan, (6) Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga, (7) Mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, (8) Mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

- 2) Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak 93,92% dan terealisasi sebesar 94,01% serta untuk target jangka menengah sesuai dokumen Renstra OPD DP2KBP3A pada tahun 2020 - 2024 ditargetkan pertumbuhan Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak pada angka 94,17%. Pencapaian pada tahun ini hampir memenuhi target Jangka Menengah Renstra OPD DP2KBP3A, realiasi terhadap target Jangka Menengah Renstra sebesar 99,83%. Hal ini perlu dijaga terus secara konsisten, agar dalam perjalanannya dalam tahun –tahun kedepan pencapaian

Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak dapat meningkat dan mencapai target akhir Renstra.

- 4) Indikator Kinerja Utama Tingkat Capaian Kota Layak Anak terealisasi predikat Pratama pada tahun 2021, dimana pada akhir periode Renstra Perangkat daerah menargetkan Predikat Utama Kota Layak Anak. Untuk mencapai tersebut masih terpaut 2 tingkatan lagi untuk mencapainya. Sebagai informasi, pencapaian predikat Kota Layak Anak terdiri 5 tingkatan yaitu : Pratama ; Madya; Nindya; Utama; Kota Layak Anak.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

Tabel. III.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Dengan Standar Nasional

No	Indikator Utama	Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Standar Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Laju Pertumbuhan Kota Pontianak	Penduduk	1,65%	1,81%	1,11
2	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak		93,92%	94,01%	91,28%
3	Tingkat Capaian Kota Layak Anak		Pratama	Pratama	-

Sumber : BPS dan DP2KBP3A Kota Pontianak, 2021

Dari tabel terlihat bahwa, analisis Capaian Kinerja masing-masing Indikator dengan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, yaitu sebagai berikut :

- 1) Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Laju Pertumbuhan Kota Pontianak pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 1,65% dan terealisasi sebesar 1,81% dibandingkan dengan target Jangka Menengah dari kementerian terkait yaitu BKKBN Pusat sebesar 1,11% memang masih sedikit

tertinggal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dikota Pontianak tahun 2021 yaitu sebesar 11,13%, jauh dibawah target nasional sebesar 8,30%.

Langkah – langkah kedepan yang akan diambil untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan penjaringan akseptor KB PUS dan unmet need melalui berbagai metode promosi KB baik melalui media elektronik, jejaring media sosial dan kegiatan pencaangan KB serta penyediaan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) bagi masyarakat miskin.

- 2) Persentase capaian kinerja IKU Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak tahun 2021 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 94,01%. Sedangkan untuk perbandingan pencapaian target ditingkat nasional, seperti yang tertera pada Rencana Strategis Kementerian PPPA Periode 2020 – 2024 pada tahun 2021 ditargetkan 91,28 %. Artinya capaian IPG Kota Pontianak telah melebihi target yang ditetapkan secara nasional. Tercapainya dari target tingkat kota maupun provinsi maupun nasional dapat dimungkinkan dari berbagai faktor seperti:

- ✓ Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi semakin tinggi di Kota Pontianak, sehingga kesenjangan pembangunan antara Perempuan dan Laki-laki semakin mengecil.
- ✓ Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kota Pontianak.

- 3) Dari indikator kinerja utama Tingkat Capaian Kota Layak Anak, tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama tersebut diatas.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Pada Tabel III.6 menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan Capaian.

Tabel. III.6
Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Serta Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2021

No (1)	Indikator Kinerja Utama (2)	Peningkatan/ Penurunan (3)	Penyebab (4)	Solusi yang dilakukan (5)
1.	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	Penurunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersusunnya dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diperdakan 2. Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi, pertumbuhan penduduk dipengaruhi urbanisasi 3. masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 4. kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber KB 5. masih banyak PUS yang menggunakan ALKON Jangka pendek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyusunan GDPK 2. Menggencarkan penjangkaran dan melakukan advokasi dan promosi lewat PLKB dan kelompok Tribina KB 3. Melakukan promosi yang efektif melalui media cetak dan elektronik serta promosi program KB melalui kampung-kampung KB yang telah terbentuk 4. Memaksimalkan peran kader dan PLKB dalam melakukan penjangkaran PUS dan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan MKJP 5. Menyediakan pelayanan MKJP gratis untuk masyarakat kurang mampu

No (1)	Indikator Kinerja Utama (2)	Peningkatan/ Penurunan (3)	Penyebab (4)	Solusi yang dilakukan (5)
2	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	Peningkatan	1. tujuh Prasyarat PUG yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, alat analisis, data terpilah, dan dukungan publik, belum seluruhnya dipenuhi oleh OPD yang ada di Kota Pontianak	6. Memaksimalkan peran Kampung KB dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas
			2. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	1. Menuangkan kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kota Pontianak.
			3. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan	2. Memperkecil kesenjangan pembangunan antara Perempuan dan Laki-laki dengan meningkatkan IPM 3. pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan melalui Program Pengarusutamaan Gender yang telah dilakukan setiap tahun 4. melakukan Inovasi pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dengan yaitu Inovasi LARA EMAKK (Layanan Perlindungan Respon Cepat BerEmpati)

No (1)	Indikator Kinerja Utama (2)	Peningkatan/ Penurunan (3)	Penyebab (4)	Solusi yang dilakukan (5)
3	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Menurun	1. Belum terlaksananya Konveksi Hak Anak (KHA) 2. Sulitnya mengumpulkan basis data gender dan anak, karena data dimiliki oleh lintas sektoral 3. Masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan 4. Belum tersedianya informasi untuk call center pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 5. Belum maksimalnya peran Sektor swasta dan dunia usaha dalam mendukung pencapaian Pontianak sebagai Kota Layak Anak	1. Mengadakan Konvensi Hak Anak (KHA) yang melibatkan seluruh stackholder terkait, termasuk dari kementerian 2. Memaksimalkan peran swasta dan dunia usaha dengan membentuk wadah 3. Memaksimalkan peran masyarakat untuk mengkampanyekan dan menerapkan nilai – nilai yang menjunjung tinggi hak – hak anak untuk pencapaian Pontianak Sebagai Kota Layak Anak 4. Memaksimalkan peran kader pendamping anak 5. Menggalakan lagi sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, melalui kegiatan Kampanye Perlindungan Anak, melalui forum PUSPA, Forum Anak Daerah 6. Membuat Call Center pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Dari Tabel dapat disampaikan Analisis Penyebab dan Solusi mengatasi masalah yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Indikator Kinerja Utama Persentase Laju Pertumbuhan Kota Pontianak pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 1,65% dan terealisasi sebesar 1,81% dibandingkan dengan target Jangka

Menengah dari kementerian terkait yaitu BKKBN sebesar 1,11% memang masih sedikit tertinggal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- a) Belum tersusunnya dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diperdakan
- b) Masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dikota Pontianak sampai dengan semester II yaitu sebesar 11,13%, jauh dibawah target nasional sebesar 8,60%.
- c) kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber KB
- d) masih banyak PUS (Pasangan Usia Subur) yang menggunakan ALKON Jangka pendek

Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diatas yaitu :

- a) Melakukan penyusunan GDPK yang bermanfaat untuk menyediakan kerangka pikir dan panduan (road map) untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan
- b) Menggencarkan penjangkaran dan melakukan advokasi dan promosi lewat PLKB dan kelompok Tribina KB
- c) Melakukan promosi yang efektif melalui media cetak dan elektronik serta promosi program KB melalui kampong-kampung KB yang telah terbentuk
- d) Memaksimalkan peran kader dan PLKB dalam melakukan penjangkaran PUS dan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan MKJP
- e) Menyediakan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) secara gratis, da khusus untuk MKJP Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP) akan digratiskan pelayanannya khusus untuk masyarakat miskin yang tidak dicover oleh BPJS

Kesehatan dan selain akan digratiskan, akseptor tersebut juga diberikan barang kebutuhan pokok untuk pengganti biaya hidup semasa mereka mendapatkan pelayanan pemasangan MOP dan MOW, hal ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan MKJP.

- f) Memaksimalkan peran Kampung KB dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

2) Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak

Faktor penghambat pencapaian IKU

- a) Meskipun PUG telah menjadi strategi nasional, tujuh Prasyarat PUG yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, alat analisis, data terpilah, dan dukungan publik, belum seluruhnya dipenuhi oleh OPD yang ada di Kota Pontianak. Integrasi gender di dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik di tingkat OPD Kota Pontianak masih harus diperkuat.
- b) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
- c) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan

Solusi yang dilakukan:

- a) Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kota Pontianak.

- b) Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi semakin tinggi di Kota Pontianak, sehingga kesenjangan pembangunan antara Perempuan dan Laki-laki semakin mengecil.
 - c) Perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan melalui Program Pengarustamaan Gender yang telah dilakukan setiap tahun dan terus di evaluasi untuk meningkatkan pencapaian tujuan.
 - d) melakukan Inovasi pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dengan yaitu Inovasi LARA EMAKK (Layanan Perlindungan Respon Cepat BerEmpati)
- 3) Indikator Utama Tingkat Capaian Kota Layak Anak
- Faktor penghambat:
- a) Belum terlaksananya Konveksi Hak Anak (KHA) yang dalam bobot penilaian Kota Layak Anak memiliki nilai tertinggi yaitu 60 point.
 - b) Sulitnya mengumpulkan basis data gender dan anak, karena data dimiliki oleh lintas sektoral
 - c) Masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan dari korban kekerasan kepada DP2KBP3A Kota Pontianak
 - d) Belum tersedianya informasi untuk call center pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - e) Belum maksimalnya peran Sektor swasta dan dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan yang bersumber dari alokasi

Corporate Social Responsibility untuk mendukung terwujudnya KLA

- f) Belum maksimalnya peran dalam menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA.

langkah yang akan dilakukan kedepan untuk pencapaian target IKU :

- a) Mengadakan Konvensi Hak Anak (KHA) yang melibatkan seluruh stackholder terkait, termasuk dari kementerian
- b) Memaksimalkan peran swasta dengan membentuk wadah / kelompok dunia usaha yang ramah anak dan peduli akan hak – hak anak
- c) Memaksimalkan peran masyarakat untuk mengkampanyekan dan menerapkan nilai – nilai yang menjunjung tinggi hak – hak anak untuk pencapaian Pontianak Sebagai Kota Layak Anak.
- d) Memaksimalkan peran kader pendamping anak yang ada disetiap kelurahan sebagai ujung tombang dalam mengidentifikasi dan memitigasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- e) Lebih menggalakan lagi sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, melalui kegiatan Kampanye Perlindungan Anak, melalui forum PUSPA, Forum Anak Daerah dan kegiatan sosialisasi yang langsung dilakukan di sekolah dan keluarahan
- f) Membuat Call Center pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel. III.7
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021

No	Sasaran Strategis /IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi	
						Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak							
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	139.829.795	134.949.795	96,51	4.880.000,00	3,49
2		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	3.184.136.280	1.892.144.138	59,42	1.291.992.142,00	40,58
3		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	828.842.190	611.147.375	73,74	217.694.815,00	26,26
Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan							
4	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	73.452.000	69.850.750	95,10	3.601.250,00	4,90
5		Program Perlindungan Perempuan	242.994.717	225.853.390	92,95	17.141.327,00	7,05
6		Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	139.362.975	117.884.100	84,59	21.478.875,00	15,41
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak							
7	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	221.646.981	197.896.477	89,28	23.750.504,00	10,72
8		Program Perlindungan Khusus Anak	407.699.579	141.735.000	34,76	265.964.579,00	65,24

Sumber :DP2KBP3A Kota Pontianak, 2021

Dari tabel diuraikan Analisis efisiensi Penggunaan untuk masing – masing Indikator adalah sebagai berikut :

- 1) Indikator Kinerja Utama Laju pertumbuhan penduduk kota Pontianak terealisasi 1,40% dengan anggaran terkait 3 (tiga) Program, 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan sebesar Rp. 4.152.808.265 terealisasi Rp. 2.638.241.308 atau sebesar 63,53%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan serapan anggaran 63,53% dan hanya didukung oleh jumlah SDM yang terbatas, terdiri dari dua bidang yaitu Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Pengendalian Penduduk dengan total jumlah personil yaitu 10 orang yang terdiri dari 2 orang Kabid, 4 orang Kasi dan 4 orang staf, target IKU tetap bisa dicapai 1,81% dibawah target yang telah ditetapkan, dengan demikian terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.514.566.957. Efisiensi sebagian besar karena selisih penawaran pembangunan Balai penyuluhan KB, gagalnya lelang pengadaan mobil antar jemput akseptor dan penggunaan dana BOKB yang tidak terserap dikarenakan pandemi covid.
- 2) Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak terealisasi 94,01% dengan anggaran terkait dari 2 (dua) Program 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan sebesar Rp. 316.446.717 terealisasi Rp. 295.704.140 atau sebesar 93,44%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan serapan anggaran 93,44%, dan hanya didukung oleh jumlah SDM yang terbatas yaitu 4 orang yang terdiri dari 1 orang Kabid, 1 orang Kasi dan 2 orang staf, target IKU tetap bisa dicapai melampaui target yaitu 94,01% IPG Kota Pontianak atau tercapai 100,10% dari target yang ditetapkan yaitu 93,892% IPG Kota Pontianak, selain itu capaian itu juga telah melebihi target nasional sebesar 91,28% target IPG Nasional, dengan demikian terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 20.742.577.

3) Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Indikator Kinerja Utama Tingkat Capaian Kota Layak Anak didukung dengan anggaran terkait dari 2 (dua) Program 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sebesar Rp. 629.346.560 terealisasi Rp. 339.631.477 atau sebesar 53,96%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan serapan anggaran 53,96%, dan hanya didukung oleh jumlah SDM yang terbatas yaitu 6 orang SDM yang terdiri dari 1 orang Kabid, 2 orang Kasi dan 3 orang staf, target IKU dicapai sesuai target.

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut:

1) SASARAN 1 : “Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
1	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,65%

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk sasaran 1 Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator Kinerja **Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak** pada tahun 2021 menargetkan 1,65% pertumbuhan penduduk Kota Pontianak, hal ini sesuai dengan Perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2021 antara Kepala Dinas dan Walikota Pontianak. Untuk mencapai target indikator tersebut dilaksanakan 3 (tiga) Program, 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan

a. Indikator “Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak”.

Strategi pencapaian Indikator ini melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program, 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan sebagai berikut :

a) Program Pengendalian Penduduk;

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi
1.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk	a) TFR (Angka Kelahiran Total) b) Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	2,39% 549	1,74% 14

Penjelasan : Realisasi Indikator Program (1,7%) lebih dari target (2,39%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (137%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**, Realisasi Indikator Program (14) kelahiran lebih dari target (549). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (255%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan target output kegiatan yaitu :Persentase keterlibatan stackholder dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk Realisasi Indikator Kegiatan (75%) sama dari target (75%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.
 - i. Sub Kegiatan Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga dengan target output sub kegiatan yaitu : Jumlah data keluarga yang dimutakhirkan sebanyak 1 data Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 data, sama dari target 1 data. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

- ii. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga dengan target output sub kegiatan yaitu :Jumlah data dan informasi keluarga yang dikelola sebanyak 1 data Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 data, sama dari target 1 data. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.
- iii. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB dengan target output sub kegiatan yaitu : Jumlah data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang dikelola sebanyak 30 data. Realisasi Indikator Sub Kegiatan 30 data, sama dari target 30 data. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran Target	Realisasi
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	a) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,48 %	70,50 %
			b) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12,47 %	11,13 %

Penjelasan; Realisasi Indikator Program (70,50%) lebih dari target (70,48%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100,03%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Realisasi Indikator Program (11,13%) lebih dari target (12,47%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (112,04%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan output kegiatan yaitu: Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) sebesar 75%, Realisasi Indikator Kegiatan (100%) sama dari target (75,35%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (132,71%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.
- i. Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja dengan target output sub kegiatan yaitu : Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif sebanyak 1 Pokja, Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 Pokja, sama dari target 1 Pokja. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.
 - ii. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan target output sub kegiatan yaitu : Jumlah Pelaksanan Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan sebanyak 48 kegiatan, Realisasi Indikator Sub Kegiatan 48 kegiatan, sama dari target 48 kegiatan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.
 - iii. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dengan target output sub kegiatan yaitu :Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan dana operasional dan sarana sebanyak 5 Balai KB, Realisasi Indikator Sub Kegiatan 5 Balai Penyuluhan KB, sama dari target 5 Balai

Penyuluhan KB. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

(2) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu : Persentase klinik KB swasta dan Pemerintah yang mendapatkan bantuan Obat-Obatan Habis Pakai Penunjang Pelayanan KB sebesar 100%, Realisasi Indikator Kegiatan (100%) sama dari target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

- i. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB dengan target output sub kegiatan yaitu : Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB sebanyak 5 paket, Realisasi Indikator Sub Kegiatan 4 Paket pengadaan Penyuluhan KB, dibawah dari target 5 Paket pengadaan Penyuluhan KB. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (80%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Berhasil”**.
- ii. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan target output sub kegiatan yaitu : Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebanyak 50 peserta, Realisasi Indikator Sub Kegiatan 50 peserta, sama dari target 50 peserta. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Berhasil”**.

c) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi
1.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Mewujudkan Keluarga yang Mandiri, Tentram dan bahagia (keluarga berkualitas)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun	19%	22,35 %

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan output kegiatan yaitu: Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 60,12%, Realisasi Indikator Kegiatan (51,82%) dibawah dari target (60,12%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (86,16%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.
 - i. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan target output sub kegiatan yaitu : Jumlah Penyediaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebanyak 2 paket, Realisasi Indikator Sub Kegiatan 2 paket, sama dari target 2 paket Penyuluhan KB. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.
 - ii. Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan target output sub kegiatan yaitu :

- Jumlah peserta aktif yang mendapatkan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebanyak 50 Peserta, Realisasi Indikator Sub Kegiatan 50 peserta, sama dari target 50 peserta Penyuluhan KB. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.
- iii. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan target output sub kegiatan yaitu : Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebanyak 3 kegiatan, Realisasi Indikator Sub Kegiatan 3 kegiatan, sama dari target 3 kegiatan Penyuluhan KB. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.
- iv. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) dengan target output sub kegiatan yaitu : Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga sebanyak 3 kegiatan, Realisasi Indikator Sub Kegiatan 3 kegiatan, sama dari target 3 kegiatan Penyuluhan KB. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

2) SASARAN 2 : “Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
2	Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,92 %

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk sasaran **2** Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan indikator Kinerja **Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak** pada tahun 2021 menargetkan 93,92%, target tersebut sesuai dengan Perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2021 antara Kepala Dinas dan Walikota Pontianak. Untuk mencapai target indikator tersebut dilaksanakan 2 (dua) Program 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan.

Indikator “Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak”.

Strategi pencapaian Indikator ini melalui pelaksanaan 2 (dua) Program dan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

- a) Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi
1.	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Pengarus Utamaan Gender serta Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	a) Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Pratama	Madya

Penjelasan : Realisasi Indikator Program Madya lebih besar dari target Pratama. Analisa Capaian Indikator Kinerja Kategori Madya. Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu : Persentase ARG pada belanja langsung APBD sebesar 11,12%, Realisasi Indikator Kegiatan (32,59%) lebih besar dari target (11,12%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (293,07%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
- i. Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan target output yaitu : Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG sebanyak 20 lembaga, Realisasi Indikator Sub Kegiatan 31 Lembaga, lebih besar dari target 20 Lembaga. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (155%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
 - ii. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan target output yaitu : jumlah peserta aktif dalam sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi sebanyak 800 peserta, Realisasi Indikator Sub Kegiatan 800 Peserta, sama dari target 800 Peserta. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

b) Program Perlindungan Perempuan

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi
1.	Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0038	0,08927

Penjelasan : Realisasi Indikator Program Rasio kekerasan 0,089 % lebih besar dari target 0,0038%. Analisa Capaian Indikator Kinerja

Kategori 4,25. Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Tidak Berhasil”**.

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu : Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani sebesar 100%, Realisasi Indikator Kegiatan (100%) sama dari target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

i. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan target output yaitu : Jumlah rakor dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan sebanyak 3 kegiatan, Realisasi Indikator Sub Kegiatan 3 kegiatan, sama dari target 3 kegiatan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

ii. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output yaitu : Jangka waktu penyediaan rumah aman /shelter untuk perempuan dan anak korban kekerasan sepanjang 12 bulan, Realisasi Indikator Sub Kegiatan 12 bulan, sama dari target 12 bulan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

3) SASARAN 3 : “Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
3	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Pratama

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk sasaran **3** Meningkatkan perlindungan terhadap anak dengan 1 Indikator Kinerja. Hal ini sesuai dengan Perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2021 antara Kepala Dinas dan Walikota Pontianak. Untuk mencapai target indikator tersebut dilaksanakan 2 (dua) Program 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan.

a) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi
1.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a) Persentase Forum Anak Daerah Aktif	100%	100%

Penjelasan : Realisasi Indikator Program (100%) sama dari target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu : Persentase pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha sebesar 30%, Realisasi Indikator Kegiatan (30%) sama dari target (30%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

- i. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output yaitu : Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak sebanyak 20 Lembaga, Realisasi Indikator Sub Kegiatan 20 lembaga, sama dari target 20 lembaga. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”

b) Program Perlindungan Khusus Anak

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi
1.	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	a) Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota	100%	100%

Penjelasan : Realisasi Indikator Program (100%) sama dari target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dengan target output kegiatan yaitu : Persentase korban kekerasan anak yang terlayani sebesar 100%, Realisasi Indikator Kegiatan (100%) sama dari target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

- i. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota dengan target output yaitu : Jumlah kasus anak mendapat pendampingan sebesar 76 kasus, Realisasi Indikator Sub Kegiatan 105 kasus, melebihi dari target 76 kasus. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (138%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

- ii. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output yaitu : Jumlah kasus anak dan perempuan yang ditangani sebesar 150 kasus, Realisasi Indikator Sub Kegiatan 105 kasus, dibawah dari target 150 kasus. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (70%). Indikator Kinerja masuk pada kategori **“Berhasil”**.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini akan disajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

**Realisasi Anggaran Yang Telah Digunakan Untuk Mewujudkan Kinerja
Sesuai Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program Penunjang	Anggaran		%
					Pagu (Rp)	Realisasi(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran 1 : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak							
1.1	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,65%	1,81%	1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	139.829.795	134.949.795	96,51
				2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.184.136.280	1.892.144.138	59,42
				3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	828.842.190	611.147.375	73,74
Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan							
2.1	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,92%	94,01%	1. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	73.452.000	69.850.750	95,10
				2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	242.994.717	225.853.390	92,95
				3. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	139.362.975	117.884.100	84,59
Sasaran 3 : Meningkatnya perlindungan terhadap anak.							
3.1	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Pratama	Pratama	1. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	221.646.981	197.896.477	89,28
				2. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	407.699.579	141.735.000	34,76

BAB IV

P E N U T U P

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2021, diukur melalui 3 (tiga) indikator utama, seperti terlihat dalam table dibawah :

Tabel IV.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Tahun 2021

No	SasaranStrategis / IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 1 : Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.1	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,65%	1,81%	91,16%
1.2	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,92%	94,01%	100,10%
1.3	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Pratama	Pratama	Pratama

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa Sasaran 1 dengan IKU 1.1 Pencapaian target 91,16% dan dinyatakan **sangat berhasil**, IKU 1.2 pencapaian target 100,10% dapat dinyatakan **sangat berhasil**, IKU 1.3 pencapaian target Pratama dinyatakan **sangat berhasil** mencapai target.

Pencapaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama didukung oleh 8 (delapan) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan. Pembiayaan terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan (termasuk kegiatan rutin dan belanja tidak langsung) tersebut diperoleh dari dana APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 10.826.008.021,00 Dengan realisasi sebesar Rp. 8.825.662.659,00 atau 81,52%.

Adapun beberapa hambatan dan kendala yang ditemui antara lain :

1. Belum tersusunnya dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diperdakan
2. Masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dikota Pontianak sampai dengan semester II yaitu sebesar 11,13%, jauh dibawah target nasional sebesar 8,60%.
3. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan
4. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
5. Belum terlaksananya Konveksi Hak Anak (KHA) yang dalam bobot penilaian Kota Layak Anak memiliki nilai tertinggi yaitu 60 point.
6. Sulitnya mengumpulkan basis data gender dan anak, karena data dimiliki oleh lintas sektoral
7. Masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak melaporkan dari sikorban kekerasan kepada DP2KBP3A Kota Pontianak
8. Belum tersedianya informasi untuk call center pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak mengupayakan berbagai langkah kebijakan berupa:

1. Melakukan penyusunan GDPK yang bermanfaat untuk menyediakan kerangka pikir dan panduan (road map) untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan
2. Menyediakan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) secara gratis, da khusus untuk MKJP Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP) akan digratiskan pelayanannya khusus untuk masyarakat miskin yang tidak dicover oleh BPJS Kesehatan dan selain akan

digratiskan, akseptor tersebut juga diberikan barang kebutuhan pokok untuk pengganti biaya hidup semasa mereka mendapatkan pelayanan pemasangan MOP dan MOW, hal ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan MKJP.

3. Perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan melalui Program Pengarustamaan Gender yang telah dilakukan setiap tahun dan terus di evaluasi untuk meningkatkan pencapaian tujuan.
4. melakukan Inovasi pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dengan yaitu Inovasi LARA EMAKK (Layanan Perlindungan Respon Cepat BerEmpati)
5. Mengadakan Konvensi Hak Anak (KHA) yang melibatkan seluruh stackholder terkait, termasuk dari kementerian
6. Memaksimalkan peran swasta dengan membentuk wadah / kelompok dunia usaha yang ramah anak dan peduli akan hak – hak anak
7. Memaksimalkan peran masyarakat untuk mengkampanyekan dan menerapkan nilai – nilai yang menjunjung tinggi hak – hak anak untuk pencapaian Pontianak Sebagai Kota Layak Anak.
8. Memaksimalkan peran kader pendamping anak yang ada disetiap kelurahan sebagai ujung tombang dalam mengidentifikasi dan memitigasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
9. Lebih menggalakan lagi sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, melalui kegiatan Kampanye Perlindungan Anak, melalui forum PUSPA, Forum Anak Daerah dan kegiatan sosialisasi yang langsung dilakukan di sekolah dan keluarahan
10. Membuat Call Center pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kebijakan pokok dan kebijakan strategis serta kebijakan yang dilakukan diharapkan akan mewujudkan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak, yaitu **“Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak”** dan pencapaian Visi Kota Pontianak **“PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG CERDAS DAN BERMARTABAT”**.